

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional dalam bidang sub sektor perkebunan, selain ditujukan untuk peningkatan ekspor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, sekaligus juga mengupayakan pembangunan ekonomi rakyat yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat pemecahan kesenjangan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas bangsa Indonesia pada umumnya dan petani perkebunan khususnya (Yusrial, 2008).

Perkembangan subsektor perkebunan, jika dilihat dari sumbangan pada PDB sektor pertanian masih jauh di bawah subsektor pertanian pangan, tetapi sebagai sumber devisa negara non-migas, sub-sektor perkebunan berperan penting. Kontribusi perkebunan menyumbang peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya kesejahteraan. Nilai PDB perkebunan secara kumulatif terus meningkat cukup fantastis dari Rp. 81,66 triliun pada tahun 2011 dan terus melambung menembus angka Rp. 159,73 triliun pada tahun 2012 atau tumbuh rata-rata pertahunnya sebesar 14,79 % (BPS, 2013).

Sub-sektor perkebunan sebagai bagian dari sektor pertanian merupakan komponen penting dalam PDB tingkat nasional, maupun PDRB tingkat provinsi. Sub-sektor ini tidak hanya merupakan sumber devisa utama sektor pertanian, tetapi juga penyedia lapangan kerja dan sumber penghasilan sebagian besar penduduk. Demikian juga di Sumatera Barat, sub-sektor perkebunan memegang peranan penting dalam pembentukan PDRB. Menurut data dari Sumatera Barat Dalam Angka (2013), penyumbang tertinggi PDRB Sumatera Barat adalah sektor pertanian yaitu 22,74%, dan lebih menjelaskan bahwa, sub-sektor perkebunan merupakan penyumbang kedua terbesar setelah pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Sumatera Barat memiliki potensi cukup besar di bidang perkebunan, karena didukung oleh lahan yang cukup luas dan iklim yang sesuai untuk komoditi perkebunan. Kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan dengan luas tanam dan produksi terbesar masing-masing 357.079 ha dan 941.579 ton. Wilayah potensi pengembangan komoditi kelapa sawit terbesar adalah di Kabupaten

Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya masing–masing lahan yang sudah digunakan seluas 153.676 Ha dan 68.667 Ha (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2013).

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang berada di persimpangan Jalur Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Padang, Pekanbaru dan Jambi. Menurut Perda No.4 Tahun 2009, luas wilayah Kabupaten Dharmasraya mencapai 2.961,13 km<sup>2</sup>. Sebagai kabupaten pemekaran, laju pertumbuhan Kabupaten Dharmasraya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB tahun 2008-2013 dengan laju tertinggi pada tahun 2013 sebesar 6,67 % jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang hanya tumbuh sebesar 4,16%. Pertumbuhan tersebut mengindikasikan Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam pembentukan PDRB Dharmasraya. Pada tahun 2012 sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 33,75 persen terhadap total PDRB, dimana penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Dharmasraya sebagian besar adalah lahan perkebunan yang menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu sentral perkebunan di Sumatera Barat yang terutama di monitori oleh perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Sub-sektor tanaman perkebunan sendiri pada tahun 2012 ini mampu memberikan kontribusinya sebesar 21,31 persen, meningkat dibanding dengan tahun 2011 yang kontribusinya tercatat sebesar 20,03 persen (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2013).

Dengan potensi wilayah Kabupaten Dharmasraya yang besar dalam perkebunan kelapa sawit ini menimbulkan dorongan terhadap investasi yang diikuti dengan berdirinya perusahaan–perusahaan yang bergerak dibidang ini. Berdirinya perusahaan–perusahaan di suatu daerah tertentu akan berpengaruh secara makro terhadap kondisi perekonomian nasional serta memiliki dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar perusahaan–perusahaan itu didirikan.

## B. Rumusan Masalah

Semenjak tahun 1987, Kabupaten Dharmasraya saat ini (setelah pemekaran), yang dahulunya masih tergabung dengan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, mulai dikembangkan menjadi salah satu daerah perkebunan kelapa sawit. Salah satu pembangunan perkebunan rakyat yang dikaitkan dengan perkebunan besar sebagai perusahaan inti, dikenal dengan pola PIR. Pembangunan perkebunan dengan pola PIR ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah, menunjang pengembangan perkebunan dan memberdayakan KUD di wilayah plasma serta meningkatkan produksi non migas (Kepres No.1 Tahun 1986 tentang pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang dikaitkan dengan program Transmigrasi).

Melalui PIR diharapkan dapat memperkecil perbedaan yang ada antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat dalam hal teknologi pengelolaan kebun, pengolahan dan pemasaran dapat dihilangkan. Disamping itu pengembangan perkebunan dengan pola PIR dilakukan untuk membangun dan membina perkebunan rakyat di wilayah baru dengan teknologi maju agar mampu memperoleh pendapatan yang layak serta meningkatkan kegiatan transmigrasi dengan mewujudkan suatu sistem pengelolaan usaha yang memadukan berbagai kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil.

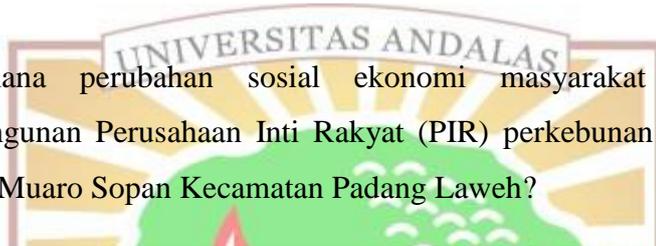
Pembangunan perkebunan dengan pola PIR ini dibangun oleh PT. Surya Andalas Kencana (SAK) Incasi Raya Group. Menurut Ketua Bamus pembukaan kebun kelapa sawit seluas 12637 Ha dengan rincian 5674 Ha untuk kebun inti dan 6963 Ha untuk kebun plasma (masyarakat) dengan kepemilikan seluas 2 Ha/KK (*personal communication*, 3 Juli 2015). Pembangunan kebun plasma kelapa sawit yang dilakukan PT SAK ini berlokasi di Kecamatan Padang Laweh.

Pembangunan perkebunan pola PIR ini tentu sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sekitar. Semula kehidupan mereka sangat bergantung pada sektor tradisional berupa ladang, mengumpulkan hasil hutan dan kebun karet rakyat dengan penghasilan musiman, tetapi dengan adanya PIR tersebut, mereka mendapatkan penghasilan secara tetap dan teratur setiap bulannya, yang diperoleh

dari hasil penjualan buah kelapa sawit (TBS) atau upah dari kegiatan kerja di kebun sawit yang dibayar oleh PT.SAK tersebut.

Dengan adanya pengembangan perkebunan pola PIR ini terbukanya kesempatan kerja, tumbuhnya pola lapangan kerja baru, dengan demikian maka akan mempengaruhi pendapatan petani baik pendapatan usaha tani maupun pendapatan diluar usaha tani. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan wilayah Kecamatan Padang Laweh sejak adanya pembangunan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) perkebunan kelapa sawit?
2. Bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat sejak adanya pembangunan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) perkebunan kelapa sawit di Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh?



### **C. Tujuan Penelitian**

Menjawab permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan adalah :

1. Mengetahui perkembangan wilayah di Kecamatan Padang Laweh sejak adanya pembangunan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) perkebunan kelapa sawit
2. Mengetahui perubahan sosial ekonomi masyarakat sejak adanya pembangunan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) perkebunan kelapa sawit di Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh.



### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari tujuan penelitian ini adalah :

1. Dapat dipergunakan sebagai input dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan baru tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit dimasa yang akan datang, atau melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku saat ini di Kabupaten Dharmasraya.
2. Dapat melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah.